

**MASALAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI DAN
PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH:

NURNANINGSIH AL HASMI

E061181016

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : MASALAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI DAN PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA

N A M A : NURNANINGSIH AL HASMI

N I M : E061181016

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Juli 2022



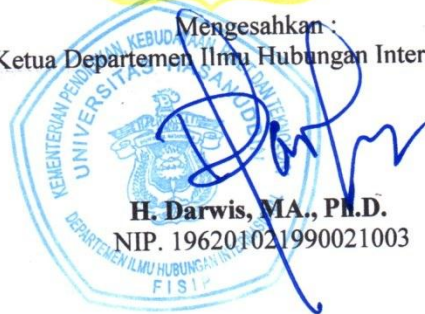
Pembimbing I,

Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 196110121987011001

Pembimbing II,

Burhanuddin, S.IP, M.Si
NIP. 197602072008011009

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : MASALAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI DAN PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA

NAMA : NURNANINGSIH AL HASMI

NIM : E061181016

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 31 Mei 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurnaningsih Al Hasmi

NIM : E061181016

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya tulis ini dengan judul :
“Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juni 2022



Nurnaningsih Al Hasmi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah atas rahmat dan kehendakNya memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dapat mengintegrasikn intelektual, emosional, dan spritual dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat tersusun tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, izinkan penulis menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak terbahasakan kepada :

1. Orang tua penulis tercinta yakni **Ibu Nurhanawati** yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis disetiap langkah penulis hingga sekarang, serta selalu menjadi penyemangat nomor satu penulis dan menjadi orang yang paling mengerti penulis, dan juga Bapak **Muh.Jufri** yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan serta doa, serta bantuan materil dan moril kepada penulis.

2. Bapak **Drs.Patrice Lumumba, MA.** selaku Dosen Pembimbing I saya dan Bapak **Burhanuddin S.IP, M.si.** selaku Dosen Pembimbing II saya atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh **Dosen dan Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas(Kak Ashry Sallatu, Kak Abdul Razaq Cangara, Kak Bama Andika, Kak Nurjannah Abdullah, Kak Aswin Baharuddin, Pak Munjin, Ibu Seniwati, Pak Agussalim, Ibu Puspa, Pak Ishaq, dan Pak Husain Abdullah)** dan dosen lain yang tidak sempat saya sebut namanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama proses perkuliahan saya sebagai mahasiswa HI di Fisip Unhas. Terkhusus untuk **kak Rahma dan Kak Dayat**, terima kasih untuk bantuan yang diberikan selama proses pengurusan administrasi penulis mulai dari masa Maba sampai sekarang.
4. **Kakak-Kakak dan Adik Penulis (Kak Muhammad Rizal, Kak Nurjannah, Kak Nurjanni, Kak Riswandi, Kak Anisa Fitri, Dek Muasyifa)**, Terima kasih banyak karena selalu memberikan dukungan kepada penulis disetiap langkah penulis. Terima kasih karena telah menjadi saudara yang selalu membantu ketika saudara yang lain susah. Terima kasih karena sudah menjadi rumah yang hangat bagi penulis untuk pulang. Terima kasih berkat dukungan dan doa kalian penulis bisa sampai di tahap ini.

5. Seluruh keluarga penulis, kakek, nenek, om, tante, kakak ipar, dan sepupu-sepupu penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas semua doa dan dukungna yang diberikan.
6. **Anjas**, *my support sistem* yang selalu *stand by 24/7* setiap penulis butuh dan selalu memberikan support moral dan spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih karena selalu ada ketika penulis butuh dan selalu menenangkan penulis ketika penulis *down*. Terima kasih karena selalu siap menjadi bahu untuk penulis bersandar ketika penulis sedih. Terima kasih telah menemani penulis dalam suka dan duka.
7. **Andi Tzamrah Istiqani Syam**, selaku sahabat rasa saudara yang telah menemani penulis dan tidak pernah meninggalkan penulis di setiap kondisi mulai dari masa SMP sampai penulisan skripsi penulis telah selesai. Terima kasih banyak adik yang super sibuk, terima kasih banyak karena mau menjadi sahabat penulis dan selalu memberikan saran yang membangun bagi penulis. Terima kasih telah mengajarkan penulis tentang arti seorang sahabat yang sebenarnya.
8. **Geng Tante Nas (Kaswa, Anis, Ririn, Fifah, Amel, Dilla)**, teman masa SMA penulis yang selalu mendukung penulis sampai sekarang. Terkhusus, **Andi An Yahdian Alhar** terima kasih karena selalu memberikan kebaikan dan dukungan bagi penulis dan tempat berdiskusi selama perkuliahan.
9. **PP agang Squad (Virda, Andi Wingky, Yusril, Yudi, Ayu, Ainun, Isty, Raisha)** teman perkumpulan di sela-sela penatnya perkuliahan, teman

yang dari maba sampai sekarang masih bersama dan memberikan support selama perkuliahan. Teman yang selalu menghibur dan memberikan canda tawa di masa perkuliahan penulis. Love u guys!

10. ***My love-hate Friendship*, Raisha Nadina Noer Fitria dan Istiqomah**

Febrian, terima kasih banyak karena sudah memberikan *effort* yang lebih selama perkuliahan kepada penulis dan menjadi tempat penulis mengeluarkan keluh kesah. Terima kasih karena selalu mendukung penulis serta menasehati dan memberikan saran yang membangun bagi penulis. Sehat-sehat terus untuk kalian berdua, *see u on top!!!*

11. **Luthfania Andriani**, *my best partner in my college*. Orang yang selalu

siap siaga dan selalu ada baik senang maupun sedih selama proses perkuliahan mulai dari mahasiswa baru sampai penyusunan skripsi. Terima kasih banyak bantuannya kepada penulis terutama dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk selalu menjadi teman bertukar cerita di kala senang maupun sedih.

12. **Banana Rush (Cece, Evi, Tole, Ody, Riko, Kiki)**, Terima kasih telah

menjadi teman baik penulis selama KKN. Terima kasih untuk susah senangnya, terima kasih untuk trip berharganya. *See u in the next Journey!*

13. Seluruh teman-teman **Reforma-UH 2018** (Husna, Dellya, Nabila, Astrid,

Tassu, Ikhwanul, Ryan, Aul, Wafiqah, Rini, Faiq Qusaiyyi, Febrian, Mario, Fadhil, Aan, Lau, Sukma, Nabel Rizki, Rahmat Riyadi, Shafwan, Rina, Suci Lestari, Munif, Zhadela, Alif Riyadi, A.Wiwi Angriana, Defky,

Nandito, Mba Farah, Putri Alifia, Afni Zugito, Kiki, Anbar dan teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan namanya), yang telah menemani hari-hari penulis dalam proses perkuliahan yang tidak akan pernah terlupakan. *See you on top guys!*

14. **Rhin Khairina Rahmat**, sobat panik-panik ajaibku ketika kuliah terutama pas pertukaran mahasiswa PERMATA SAKTI. Pokoknya terima kasih karena telah menemani di waktu-waktu genting dan selalu bersama-sama panik sampai detik terakhir pengumpulan tugas kuliah. Surgaki Erin!
15. Seluruh teman-teman **KKN UNHAS Gel 106 Wilayah Tamalate 1** atas kebersamaan dan pengalaman-pengalaman berharga selama penulis melakukan pengabdian masyarakat di wilayah tamalate.
16. **HIMAHI FISIP UNHAS**, sebagai wadah bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak di dapatkan di dalam kelas, dan membuat penulis belajar banyak tentang keorganisasian.
17. ***Big Appreciation for my self*** karena sudah mampu *survive*, melawan rasa malas, capek, letih dan lesu dalam mengerjakan tugas akhir. Selamat karena sudah berani melakukan perkuliahan sambil bekerja. Terima kasih karena sudah mandiri dan tidak membebani orang tua. Dan terima kasih karena sudah mengerjakan skripsi dengan setulus hati. Salam dari diri sendiri.

ABSTRAK

NURNANINGSIH AL HASMI, E061181016, “Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia”. Dibawah bimbingan Bapak Drs.Patrice Lumumba, M.A, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin S.IP, M.si selaku Dosen Pembimbing II, pada departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi dan substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Dalam menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel berita, maupun sumber-sumber informasi yang kredibel lainnya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendasari perjuangan diplomasi Republik Indonesia di Arab Saudi, yakni didasari oleh amanah konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk TKI di Arab Saudi. Adapun substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia yakni untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia yang memprioritaskan perlindungan terhadap TKI. Banyaknya TKI ke Arab Saudi disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara tersebut selaku negara maju yang terus membangun negaranya di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan TKI ke Arab Saudi agar dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia, akan tetapi akibat dari pengiriman tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti: penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan, dan pembuhunan yang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Dengan dasar itu, sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan nasib para TKI tersebut melalui diplomasinya seperti memediasi kepentingan para TKI dengan Pemerintah Arab Saudi, memberi advokasi atau bantuan hukum.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia, Hubungan Bilateral, Diplomasi, Arab Saudi.

ABSTRACT

NURNANINGSIH AL HASMI, E061181016, *"The Problem of Indonesian Migrant Workers (TKI) in Saudi Arabia and the Diplomatic Struggle of the Republic of Indonesia"*. Under the guidance of Mr. Drs. Patrice Lumumba, M.A, as Supervisor I and Mr. Burhanuddin S.IP, M.si as Supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the basis of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia in the problem of TKI in Saudi Arabia and the substance of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia against the problem of TKI in Saudi Arabia. In answering the research, the author uses descriptive qualitative research methods through literature studies by collecting data from various literary sources such as journals, books, scientific articles, news articles, and other credible sources of information. The data that has been obtained is then processed and analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of the study indicate that the basis for the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia in Saudi Arabia, which is based on the mandate of the constitution of the Republic of Indonesia to provide protection for Indonesian citizens (WNI) abroad, including Indonesian migrant workers in Saudi Arabia. The substance of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia is to realize the goals and objectives of the diplomacy of the Republic of Indonesia which prioritizes the protection of TKI. The large number of migrant workers to Saudi Arabia is due to the high demand from the country as a developed country which continues to develop its country in various sectors, thus requiring a lot of manpower. This is an opportunity for the Government of Indonesia to send TKI to Saudi Arabia in order to reduce unemployment and improve the economy of the people in Indonesia, but the consequences of this delivery cause various problems such as: persecution, unpaid salaries, harassment, and murder which cause problems in the context of Indonesia-Saudi Arabia relations. On that basis, as a consequence, the Indonesian Government must fight for the fate of the TKI through diplomacy such as mediating the interests of the TKI with the Government of Saudi Arabia, providing advocacy or legal assistance.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Bilateral Relations, Diplomacy, Saudi Arabia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Tentang Diplomasi.....	22
B. Konsep Tentang Hubungan Bilateral	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASALAH TKI DI ARAB SAUDI DAN PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA.....	34
A. Tenaga Kerja Indonesia.....	34
1. Motivasi Tenaga Kerja Indonesia	34
2. Klasifikasi Tenaga Kerja Indonesia	41
B. Perjuangan Diplomasi Indonesia.....	47
1. Dasar Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia	47
2. Substansi Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia	52
BAB IV WUJUD PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERMASALAHAN TKI DI ARAB SAUDI.....	59
A. Perlindungan dan Advokasi	59
B. Pemberian Bantuan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Remitansi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.....	37
Tabel 3.2 Jumlah Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.....	50
Tabel 4.1 Data TKI Meninggal dunia di Pulangkan ke Indonesia.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mengirimkan banyak tenaga kerja ke luar negeri yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun harus memenuhi syarat bekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengiriman TKI menjadi salah satu sumber pendapatan negara yakni sebagai sumber penghasil devisa tertinggi negara, selain dari bidang pariwisata dan bidang ekonomi lainnya.

Banyak orang yang ingin menjadi TKI disebabkan oleh kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para TKI. Selain itu, upah atau gaji yang ditawarkan ketika seseorang bekerja di luar negeri biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Hal tersebut membuat semakin banyak warga negara Indonesia yang ingin menjadi TKI di luar negeri.

Pengiriman TKI ke luar negeri ini juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. TKI menjadi salah satu sektor penyumbang devisa terbesar ke Indonesia melalui Perusahaan Pekerja Migran

Indonesia (P3MI), yang merupakan perusahaan terbesar di bidang ketenagakerjaan dalam menyumbangkan devisa ke Indonesia setelah pemasukan Indonesia dari sektor gas bumi dan minyak.¹

Pengiriman TKI ke luar negeri juga merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengiriman TKI ke luar negeri telah membuka peluang bagi para pencari kerja di dalam negeri untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan bagi pemerintah, pengiriman TKI ke luar negeri menjadi peluang negara untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM), yang jumlahnya banyak di Indonesia dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui adanya pembukaan lapangan pekerjaan di luar negeri. Menurut Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terdapat 7,05 juta penduduk Indonesia menganggur, kemudian jika dibandingkan pada tahun 2018, maka jumlah pengangguran yang ada di Indonesia meningkat sebanyak 50 ribu jiwa.² Sehingga, pemerintah Indonesia senantiasa melakukan berbagai cara untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia, salah satunya pengiriman TKI ke Arab Saudi.

¹ Setiawan, 2019, *Perusahaan Jasa TKI Klaim Hasilkan Remitansi Rp 218 T Hingga 2019*, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1270462/perusahaan-jasa-tki-klaim-hasilkan-remitansi-rp-218-t-hingga-2019>.

² Sidik Pangestu. 2020. "Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi." Universitas Al-Ghifari. *Skripsi*. hal 8

Salah satu negara yang menjadi negara tujuan pengiriman TKI ke luar negeri, yaitu Arab Saudi. Negara ini juga menjadi salah satu negara penempatan TKI di Kawasan Timur Tengah karena Arab Saudi sangat bergantung dengan tenaga kerja dari luar negeri untuk mengisi sektor-sektor informal yang ada di negaranya. TKI yang dikirim ke Arab Saudi didominasi oleh pekerja di bidang Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Arab Saudi merupakan negara yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi pasca ditemukannya minyak bumi sebagai sumber penghasilan terbaru di negara ini yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut. Adanya kemajuan ekonomi, modernisasi dan perubahan struktur sosial di negara Arab Saudi memberikan dampak kepada tingginya permintaan tenaga kerja di sektor domestik untuk menjadi buruh kasar.

Pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi membuat negara ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing karena tenaga kerja lokal di nilai kurang terampil dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan pembangunan di Arab Saudi. Selain itu, kemajuan ekonomi dan demokratisasi di Arab Saudi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan gaya hidup di negara ini, sehingga pekerjaan rumah tangga di nilai sebagai pekerjaan yang rendah dan masyarakat Arab Saudi lebih memilih mempekerjakan pekerja dari luar

negeri untuk mengerjakan pekerjaan domestik, dimana TKI di Indonesia mendominasi sektor tersebut.

Tingginya permintaan tenaga kerja asing oleh Pemerintah Arab Saudi kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang sangat banyak namun lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas, sehingga hal ini dijadikan peluang untuk mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi agar mampu meminimalisir angka pengangguran di Indonesia dan mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui sumbangan dana remitansi yang dihasilkan dari pengiriman TKI ke Arab Saudi. Banyaknya pengiriman TKI ke Arab Saudi ini juga dipermudah oleh adanya hubungan religius yang erat dan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, sehingga para TKI lebih mudah beradaptasi ketika bekerja disana.

Indonesia dan Arab Saudi sendiri telah menjalankan hubungan diplomatik sejak tahun 1950, dan telah membentuk perjanjian persahabatan (*Treaty of Friendship*) pada tahun 1970.³ Selain itu, hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin ditingkatkan melalui berbagai bidang kerja sama, termasuk kerja sama ketenagakerjaan. Namun, bidang tenaga kerja ini merupakan salah satu bidang yang sering menimbulkan masalah antara

³Muhammad Kurnia Majid, 2014, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011", UIN Syarif Hidayatullah. *Skripsi*.

Indonesia dengan Arab Saudi. Masalah tersebut meliputi masalah Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi, seperti tindakan penganiayaan, hukuman mati dan masih banyak masalah lain.

Selain itu, bidang tenaga kerja yang banyak ditempati oleh TKI dan paling dibutuhkan di Arab Saudi, yakni di sektor informal seperti di bidang tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) karena mampu menampung TKI yang berpendidikan rendah, sehingga sektor PLRT ini yang paling banyak menyumbangkan devisa bagi negara. TKI yang bekerja yang masuk ke dalam bidang PLRT ini umumnya merupakan tenaga kerja yang hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP, yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Sehingga, ini menjadi penyebab mengapa TKI banyak ditempatkan di bidang PLRT Arab Saudi.⁴

Meskipun TKI dianggap sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia, tetapi TKI di Arab Saudi seringkali mendapatkan permasalahan yang berupa kekerasan, dituduh sebagai pembunuh, penyiksaan fisik dari majikan, hukuman mati dan bahkan permasalahan terkait status TKI yang ilegal atau TKI yang tidak memiliki izin tinggal (*Overstayers*). Permasalahan TKI ini kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar permasalahan TKI ini bisa diselesaikan.

⁴ Ismail, 2019, "Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014, " *Ilmu Hubungan Internasional* Vol 7, No. 1.: p.481-496.

Permasalahan yang dialami oleh TKI terutama di sektor informal dapat dibagi menjadi dua yakni yang pertama disebabkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) dan permasalahan yang disebabkan oleh agensi atau majikan. Adapun contoh permasalahan yang TKI yang disebabkan oleh PTKIS yaitu TKI tidak membawa Perjanjian Kerja (PK) dan TKI berangkat tanpa memiliki keterampilan yang memadai dan kurang memahami budaya dan bahasa di negara tujuan. Sedangkan contoh permasalahan TKI yang disebabkan oleh majikan yaitu TKI tidak diberikan upah, TKI di aniaya oleh majikan dan majikan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, Pemutusan Kerja Sepihak (PHK) dan TKI biasanya bekerja melebihi masa kontrak dan majikan tidak memperpanjang kontrak ataupun memulangkan TKI ke Tanah Air.⁵ Selain itu, para TKI terkadang tidak diijinkan mengambil waktu libur sesuai dengan yang ada di dalam Konvensi ILO, dan tidak diperbolehkan untuk ke kantor polisi atau menelfon KBRI untuk berkomunikasi jika ada kekerasan yang terjadi di dalam tempat kerjanya.⁶

Banyak Tenaga Kerja Indonesia yang faktanya memiliki status ilegal yang masuk ke Arab Saudi menggunakan visa umroh namun dimanfaatkan untuk bekerja, kemudian selalu berpindah-pindah majikan tetapi tidak melalui

⁵ Sekdilu35.2010. *Mengarungi Ssamudera Yang Bergolak: Sumbangan Pemikiran Diplomat Muda Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Hal 14

⁶ *Ibid.*

prosedur yang telah ditetapkan dan sebagainya. Jumlah para TKI yang melanggar izin tinggal ini menimbulkan masalah bukan hanya ke Pemerintah Indonesia melainkan ke Pemerintah Arab Saudi terkait bagaimana solusi yang harus dilakukan agar para TKI ini bisa dipulangkan atau di deportasi dengan menggunakan biaya yang besar.⁷

TKI merupakan warga negara di luar negeri yang penting untuk diberikan perlindungan. Para TKI baik yang memiliki status pendidikan tinggi ataupun rendah tetaplah harus diberikan perlindungan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".⁸ Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.⁹ Maka dari itu, perlindungan terhadap TKI di luar negeri haruslah merata.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi itu sendiri telah dilakukan dari berbagai

⁷ Ismail, 2019, "Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014", *Journal Ilmu Hubungan Internasional. Vol 7 No 1*. p. 483

⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

macam cara yakni salah satunya diplomasi perlindungan. Diplomasi sebuah konsep yang diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antar negara yang dilakukan untuk mewujudkan politik luar negeri setiap negara.

Diplomasi perlindungan itu sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya melalui cara-cara negosiasi atau tanpa kekerasan. Dalam mengatasi permasalahan TKI DI Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali membahas perlindungan terhadap TKI bersama dengan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan antar pejabat tinggi di Jeddah pada Tahun 2011 untuk membahas perbaikan perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi yang menghasilkan penandatanganan pra Memorandum of Understanding (MoU) antara Arab Saudi dan Indonesia.¹⁰ Kemudian, pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk menandatangani MoU di Riyadh, Arab Saudi yang menitikberatkan pada perlindungan TKI di Arab Saudi.¹¹

Selain itu, perlindungan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memberikan bantuan kepada pihak TKI yang memiliki masalah berupa bantuan pemulangan TKI ke tanah air, guna menghindari ancaman hukuman yang

¹⁰ Ismail,2019, “Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014”, *Journal Ilmu Hubungan Internasional. Vol 7 No 1.* p. 483.

¹¹ *Ibid.*

diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi terutama bagi TKI yang memiliki status ilegal atau tidak memiliki izin tinggal di Arab Saudi.

Di Era Presiden Joko Widodo telah dilakukan upaya untuk melindungi TKI dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut banyak peran pihak swasta dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri dipangkas habis.¹² Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022 juga akan difokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk perlindungan TKI.¹³

Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi bagi TKI di Arab Saudi dan bagaimana wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam menangani masalah tersebut melalui judul penelitian **“MASALAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI DAN PERJUANGAN DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA”**.

¹² Kompas, 2018, *Perlindungan Pekerja Migran*. Jakarta: Koran Kompas,

¹³ Uni Lubis, 2022, *5 Prioritas Diplomasi Indonesia Tahun 2022*, Diakses pada tanggal 27 April 2022 melalui <https://www.idntimes.com/opinion/politic/uni-lubis/lengkap-5-prioritas-diplomasi-indonesia-tahun/full>

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah di dalam penelitian yang akan penulis lakukan yakni terletak pada permasalahan yang terjadi pada Tenga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi khususnya TKI di sektor informal dan bagaimana perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Republik Indonesia dalam menangani permasalahan yang dirasakan oleh TKI tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apa yang mendasari perjuangan diplomasi Republik Indonesia yang berkaitan dengan TKI di Arab Saudi?
2. Bagaimana wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun penelitian ini dilakukan bertujuan:

- a. Untuk mengetahui apa yang mendasari perjuangan diplomasi Republik Indonesia yang berkaitan dengan TKI di Arab Saudi.
- b. Untuk mengetahui wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi.

2. Kegunaan Penulisan

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait permasalahan yang di alami oleh TKI di Arab Saudi dan bagaimana perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa terkait pembahasan mengenai masalah TKI di Arab Saudi dan bentuk perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Republik Indonesia.
- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep diplomasi perjuangan Republik Indonesia dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya untuk meneliti permasalahan serupa atau terkait.

D. Kerangka Konseptual

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan orang-orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia baik perempuan maupun laki-laki yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia juga dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja diluar dari Negara Indonesia. Pada umumnya Tenaga kerja Indonesia atau

yang biasa disebut juga Pekerja Migran Indonesia ini biasanya bekerja dengan ikut bersama dengan majikan atau biasa disebut pengusaha.

TKI merupakan orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terdapat banyak orang yang memiliki minat untuk bisa bekerja di luar negeri, sehingga memberikan peluang bagi segelintir pengusaha untuk mendirikan perusahaan jasa, seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bergerak untuk membantu para TKI agar mampu bekerja di luar negeri. PJTKI membantu mengirim TKI keluar negeri sesuai dengan permintaan dari beberapa negara asing, seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura dan Hongkong.

Tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja yang bermutasi ke negara lain yang biasanya disebabkan juga oleh permintaan dari negara tempat mereka bekerja. Negara tempat tenaga kerja Indonesia tersebut biasanya mengalami krisis tenaga kerja di sektor atau bidang yang memiliki upah yang relatif rendah. Sehingga, tenaga kerja biasanya memiliki gaji yang lebih rendah daripada pekerja lokal. Banyaknya permintaan TKI dari luar negeri ini biasanya disebabkan oleh murahnya harga TKI di luar negeri, termasuk di Arab Saudi.

Sejak amandemen Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran pada tahun 2017, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka PJTKI kemudian berubah nama menjadi P3MI yaitu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.¹⁴ Selain itu, Tenaga kerja Indonesia juga secara resmi berubah nama menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tentang Pekerja Migran Tahun 1949, No.97 Pasal 11 menjelaskan bahwa pekerja migran merupakan seseorang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud dan tujuan untuk dipekerjakan selain digunakan untuk usahanya sendiri.¹⁵ Selain itu, tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja yang banyak dibutuhkan oleh negara-negara maju untuk menutupi kekurangan pekerja seperti di sektor pertanian, industri atau pekerjaan rumah tangga. Selain itu, banyak negara di dunia ini yang bergantung dengan jasa tenaga kerja Indonesia agar mampu membantu mereka untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja mereka, dimana penghasilan dari pekerjaan tersebut akan dikirimkan ke negara asal mereka yang menjadi sumber pendapatan devisa negara.

¹⁴Humas, 2019, *BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Diakses pada tanggal 2 November 2022 melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

¹⁵ Shabana, Amin.2020. "Jaringan Komunikasi Kelompok Berbasis Mobile Phone Pekerja Migran Indonesia di Hongkong." Jakarta of Muhammadiyah University. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*. Vol 3 hal 304.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga atau *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) khususnya dalam pasal 2 ayat 1 konvensi tersebut menjelaskan definisi pekerja migran sebagai seseorang yang akan terlibat, terlibat atau telah terlibat dalam sebuah kegiatan yang dibayar pada suatu negara yang dimana orang tersebut tidak berasal dari negara itu atau bukan warga negaranya.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin P3MI menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.¹⁷

Beberapa faktor yang menjadi dorongan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri dan faktor dorongan keluarga maupun orang

¹⁶ World Health Organization, "The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families", *Health and Human Rights*. Hal 1.

¹⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

terdekat mereka yang memaksa para tenaga kerja Indonesia ini untuk bekerja di luar negeri. Namun, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor yang lain.¹⁸ Menurut Datta, adapun yang menjadi alasan kuat adanya migrasi tenaga kerja yaitu kemiskinan, pengangguran, penghasilan rendah, dan ketidakpastian ekonomi.¹⁹

Adapun berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh TKI yakni terbagi atas dua, yaitu TKI formal dan informal. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal merupakan tenaga kerja yang bekerja dibawah perusahaan yang mempunyai badan hukum seperti di sektor industri, kesehatan, manufaktur, dan lain sebagainya yang dinaungi oleh perusahaan. Sedangkan TKI informal merupakan tenaga kerja yang bekerja diluar dari perusahaan seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), sopir, dan pekerja kebun.²⁰ Kebutuhan setiap negara terhadap tenaga kerja juga berbeda-beda, misalnya di Arab Saudi lebih banyak dibutuhkan pekerja di sektor rumah tangga, sehingga tenaga kerja Indonesia banyak yang bekerja di sektor tersebut.

¹⁸ Azmy, 2012, Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

¹⁹ Kushnirovich, Nonna, 2010, "Migrant Workers: Motives for Migration, Contingency of Choice and Willingness to Remain in the Host Country." Common Ground Publishing. *The International Journal of Diversity in Organisations, Communities, and Nations* . Vol 10 No. 3 hal 150.

²⁰ Haziq. 2018. *Pekerja Sektor Formal dan Informal*. Diakses pada tanggal 4 November 2021 melalui https://www.academia.edu/24630473/Pekerja_Sektor_Formal_Informal

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI ini kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai masalah-masalah yang dialami oleh TKI khususnya di Arab Saudi yang dimana negara ini menjadi salah satu tujuan utama bagi pengiriman TKI ke luar negeri, serta menganalisis bagaimana langkah atau upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan perjuangan diplomasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia

Diplomasi merupakan sebuah konsep penting di dalam hubungan internasional terutama di dalam hubungan antar negara, dan selalu mempunyai keterkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain, Indonesia menggunakan konsep diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan negaranya, termasuk dalam perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.²¹

Perjuangan diplomasi itu sendiri merupakan sebuah langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan negara yang hendak untuk dicapai. Perjuangan diplomasi Republik Indonesia juga dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi pelaksanaan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia Tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu memimpin diplomasi yang efektif dan aktif untuk

²¹ Abdul Irsan, 2007, *Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi*, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu. Hal.81

mewujudkan Indonesia maju, dimana prioritas kebijakan akan bertumpu pada penguatan diplomasi perlindungan, diplomasi ekonomi, diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, serta memperkuat infrastruktur diplomasi.²²

Berdasarkan judul dari topik penelitian, salah satu hal yang akan dianalisis penulis yakni mengenai perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi. Perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam melindungi TKI dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022. Adapun sasaran dan tujuan diplomasi Indonesia Tahun 2021-2022 yang menjadi prioritas yakni membangun ketahanan kesehatan nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi, penguatan sistem perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI), berkontribusi dalam memajukan isu di dunia, serta melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.²³

Perjuangan diplomasi untuk melindungi warga negara Indonesia menjadi salah satu prioritas diplomasi Rrepublik Indonesia yang akan terus diperjuangkan Indonesia termasuk diantaranya perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Perlindungan terhadap WNI di luar negeri selalu menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk senantiasa

²² Kementerian Luar Negeri, 2020, "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024"

²³ Kementerian Luar Negeri, 2021, *Menlu RI sampaikan capaian politik luar negeri Indonesia 2020 dan prioritas diplomasi 2021*, diakses pada tanggal 30 April 2022 melalui <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>

melakukan upaya yang terbaik agar mampu melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri melalui berbagai cara, salah satunya diplomasi.

Diplomasi menerapkan keahlian maupun taktik dalam proses hubungan internasional melalui cara negosiasi yang dilakukan oleh *state actor* yaitu diplomat dan duta besar.²⁴ Diplomasi juga merupakan bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebuah solusi untuk menangani permasalahan/konflik sebuah negara dengan negara lain melalui cara yang damai.

Maka dari itu, penulis akan menganalisa bagaimana konsep perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi sebagai wujud dari perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri yang tercantum di dalam tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022. Penulis akan menggambarkan bagaimana diplomasi dijadikan sebagai langkah atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini tujuan negara Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi.

²⁴ Andrik Purwasito, 2018, "Nano Power Diplomacy Out of The Mainstream." Mandala, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 1*. hal. 2.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan sebagai pendekatan yang berfokus pada analisis deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena secara deskriptif dan holistik. Metode ini akan membantu penulis dalam menganalisis secara deskriptif bagaimana bentuk permasalahan TKI di Arab Saudi dan perjuangan diplomasi Republik Indonesia.

Metode kualitatif dipilih oleh peneliti dengan melihat kebutuhan penelitian adalah analisis deskriptif terkait topik dan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Adapun karena bersifat analisis deskriptif, peneliti akan membutuhkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait kasus atau topik yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi literatur. Kebutuhan penelitian akan data dan informasi terkait kasus atau topik penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dokumen pendukung terkait masalah TKI di Arab Saudi dan perjuangan diplomasi Republik Indonesia

serta sumber-sumber informasi yang diperoleh melalui media internet atau digital.

3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Keterbatasan akses dan jarak penulis terhadap sumber data primer sehingga penulis memutuskan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, tapi melalui buku, jurnal, media berita, dokumen pendukung, hingga media internet yang dapat memberikan informasi terkait masalah TKI di Arab Saudi dan perjuangan diplomasi Republik Indonesia yang diperoleh dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Data-data ini dapat berupa informasi mengenai masalah yang dialami oleh TKI di Arab Saudi dan bentuk-bentuk perjuangan diplomasi yang dilakukan Republik Indonesia dalam menangani masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Sejalan dengan metode penelitian yang diambil, teknik analisis kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif fakta-fakta dan informasi yang diperoleh melalui data sekunder dari berbagai sumber untuk mendapatkan narasi deskriptif yang menjawab pertanyaan penelitian.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode ini akan dilakukan dengan penggambaran analisis deskriptif terkait kasus atau topik penelitian secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, gambaran umum tersebut akan diklasifikasikan ke spesifikasi sub-topik penelitian hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan analisis sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun analisis data dari hasil pengumpulan data diolah dan dianalisis dengan mengaitkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah alat yang penting untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi diyakini dapat menjadi alat utama dalam pencapaian *national interest* suatu negara terhadap negara lain. Konsep diplomasi itu sendiri merupakan aktivitas politik yang biasanya dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuannya atau kepentingannya dengan cara bernegosiasi tanpa menggunakan kekerasan, hukum atau propaganda.²⁵ Diplomasi menjadi sebuah konsep dasar bagi setiap negara ketika ingin melakukan sebuah hubungan bilateral dengan negara lain sebelum sampai ke tingkat lebih lanjut. Diplomasi juga dapat dikatakan sebagai proses penerapan taktik dan strategi pada proses pelaksanaan hubungan antar negara.²⁶

Diplomasi pada hakikatnya selalu mengalami perkembangan, dimana perkembangan diplomasi memiliki model baru yang menonjol yakni model diplomasi yang lebih transparan kepada publik dan negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam diplomasi, namun muncul organisasi internasional sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan diplomasi.²⁷ Selain itu, cakupan

²⁵ Rizki Rahmadini Nurika, 2017, "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer." *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 1, p.126-141

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Asep Setiawan, 2016, "Teori dan Praktik Diplomasi", Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Diktat*. Hal 17

kegiatan diplomasi juga semakin diperluas di mana dahulu model diplomasi lama atau tradisional, negara hanya senantiasa mewujudkan kepentingan keamanan semata namun sekarang kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga menjadi suatu cakupan yang penting untuk diperjuangkan. Kedua isu ini kemudian menjadi salah satu hal yang selalu di upayakan dalam setiap perundingan oleh setiap negara.

Aktivitas diplomasi tidak lagi hanya berfokus kepada masalah keamanan setiap negara, namun juga difokuskan kepada isu sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Dimana isu ini juga dikenal sebagai isu “*low politics*” yang berbeda dengan agenda diplomasi lama yang dikenal dengan istilah isu “*high politics*” yang mengedepankan isu keamanan. Diplomasi juga terkadang disalahartikan oleh beberapa orang sebagai kebijakan luar negeri atau politik luar negeri. Namun, diplomasi dan politik luar negeri merupakan dua hal yang berbeda tetapi kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Diplomasi adalah salah satu alat/instrumen dalam mewujudkan kebijakan luar negeri atau istilah lain diplomasi merupakan pelaksanaan dari politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemimpin politik melalui diplomat.²⁸

Diplomasi mengarah pada kemampuan untuk mengatur perilaku setiap aktor negara dalam dunia internasional dengan menggunakan alat atau

²⁸ Chas W.Freeman, 2015, *Diplomacy*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 melalui Britannica: <https://www.britannica.com/topic/diplomacy/History-of-diplomacy>

instrument diplomasi.²⁹ Diplomasi juga merupakan bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebuah solusi untuk menangani permasalahan sebuah negara dengan negara lain melalui cara yang damai. Tetapi, walaupun diplomasi berkaitan dengan aktivitas yang tergolong damai, namun tidak bisa dipungkiri jika diplomasi terjadi dalam kondisi perang. Hal itu dikarenakan fungsi utama diplomasi juga bukan hanya mengatur sebuah konflik, akan tetapi memajemen sebuah revolusi dan memelihara perdamaian dengan cara pendekatan persuasi terus menerus di tengah kondisi perubahan yang sedang berlangsung.³⁰

Diplomasi juga bisa dikatakan sebagai penyatuan antara seni dan ilmu perundingan atau cara untuk menyalurkan pesan melalui perundingan atau negosiasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan suatu negara yang berkaitan dengan bidang ekonomi, politik, perdagangan, budaya, militer, kesejahteraan rakyat, serta kepentingan yang lain dalam ruang lingkup hubungan internasional. Menurut Kautilya bahwa tujuan utama dari sebuah diplomasi yakni untuk pengamanan kepentingan negara sendiri.³¹ Maksud dari penjelasan tersebut bahwa tujuan utama negara melakukan diplomasi semata-mata untuk menjamin keuntungan maksimum negaranya masing-masing. Kepentingan negara selain dalam melakukan diplomasi selain dari

²⁹ Skolastika Lilienasih Kurniawati, 2017, "Pengertian Diplomasi dalam Studi Hubungan Internasional." *academia.edu*.

³⁰ A Watson, 1984, *The Dialogues Between States*. London: Matheum.

³¹ Barati Mukherjee, 1976, "Kautilya's Concept of Diplomacy: a New Interpretation". Minerva Associates, diakses pada 7 Mei 2022 melalui <https://searchworks.stanford.edu/view/935428>

kepentingan keamanan juga dilakukan untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, komersial, dan perlindungan warga negara yang berada di negara lain.

Kegiatan diplomasi dilakukan dengan upaya untuk mempengaruhi kebijakan, tujuan, tindakan maupun sikap dari pemerintahan negara lain dan para diplomatnya melalui cara-cara persuasi maupun saling mempertukarkan konsesi atau saling mengirimkan ancaman.³² Menurut, Chas W.Freeman Diplomasi juga merupakan substitusi utama untuk penggunaan *power* atau cara curang di dalam bidang kewarganegaraan dan proses menggunakan *national power* dalam melakukan perundingan damai dengan negara lain. Seringkali cara tersebut bersifat koersif yang artinya didukung oleh kekuatan ancaman atau menggunakan kekerasan namun tanpa kekerasan secara terbuka.³³

Diplomasi biasanya dilakukan dengan cara dialog dan negosiasi yang dilakukan oleh para utusan yang terpilih (diplomat) dan para pemimpin politik lainnya seperti duta besar atau semacamnya. Hal lain yang membedakan antara politik luar negeri dan diplomasi yakni politik luar negeri pada umumnya dilakukan secara terbuka, sedangkan diplomasi dilakukan secara rahasia, meskipun fakta bahwa diplomasi itu sedang berlangsung dan hasilnya selalu dipublikasikan tetapi proses diplomasinya dirahasiakan.

³² Sukawarsini Djelantik, 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 4

³³ Chas W.Freeman, 2015, *Diplomacy*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 melalui Britannica: <https://www.britannica.com/topic/diplomacy/History-of-diplomacy>

Diplomasi merupakan sebuah konsep yang sangat penting di dalam hubungan internasional, dikarekanan jika diplomasi tidak ada, maka forum atau organisasi internasionalpun tidak ada, dunia akan terus berada di dalam keadaan berkonflik dan tidak akan berakhir tanpa adanya proses negosiasi dan diplomasi di dalam menyelesaikan konflik tersebut.³⁴ Diplomasi juga menjadi tempat komunikasi antara *political leaders of states* dan berbagai entitas lain didalam dunia politik.

Konsep diplomasi secara umum dibagi menjadi dua yaitu *Soft Diplomacy* dan *Hard Diplomacy*. Adapun *Soft diplomacy* yaitu diplomasi yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian konflik secara damai khususnya dalam bidang kebudayaan, persahabatan, bahasa, dan ekonomi. Sedangkan *Hard Diplomacy* yaitu diplomasi dalam bentuk perang seperti agresi militer dan politik.³⁵ Diplomasi juga merupakan sebuah upaya untuk memelihara relasi yang baik antar negara supaya mendapatkan manfaat yang sama dalam kerja sama internasional. Menurut Sir Earnest Satow, pengertian diplomasi yaitu sebuah penerapan taktik atau kepandaian terhadap pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara berdaulat.³⁶

Diplomasi juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan baik beberapa negara yang diperoleh dari kerja sama yang saling menguntungkan

³⁴ Anon, 2011, *The Functions Of Diplomacy*. Diakses dari E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2011/07/20/the-functions-of-diplomacy/> pada tanggal 20 Januari 2022

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Rendi Prayuda, 2020, "Diplomasi dan Power : Sebuah Kajian Analisis", *Journal of Diplomacy and International Studies*, P-ISSN: 2656-3878

serta untuk memperoleh keuntungan maksimum. Diplomasi memiliki tujuan untuk menjamin keuntungan yang maksimal bagi sebuah negara baik di dalam bidang politik, perdagangan, ekonomi, perlindungan warga negara di luar negeri, pengembangan ideologi dan budaya, peningkatan hubungan persahabatan dengan negara lain, atau bahkan membangun citra positif bagi setiap negara.

Diplomasi menerapkan keahlian maupun taktik dalam proses hubungan internasional melalui cara negosiasi yang dilakukan oleh *state actor* yaitu diplomat dan duta besar.³⁷ Menurut Paul Sharp di dalam bukunya yang berjudul "*Diplomatic Theory Of International Relations*" menjelaskan bahwa diplomat akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kepentingan negara yang ia representasikan. Jika menipu dibutuhkan maka ia akan menipu, apabila berbohong adalah suatu yang bermanfaat baginya, maka ia akan berbohong, dan jika kegiatan suap itu dapat membantu, maka dia akan menyuap, serta apabila rayuan dan pemalsuan dapat menjadi sebuah cara yang cepat untuk mendapatkan kesuksesan, maka cara itu semua akan dilakukan tapi dengan semua cara itu seorang diplomat akan tetap menjadi orang yang terhormat.³⁸

³⁷ Andrik Purwasito, 2018, "Nano Power Diplomacy Out of The Mainstream." Mandala, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol 1 No 1.

³⁸ Paul Sharp, 2009, *Diplomatic Theory Of International Relations*, New York: Cambridge University Press

Diplomasi digunakan untuk menyelesaikan agenda-agenda tertentu di luar batas negara. Di zaman kontemporer, aktor diplomasi juga menjadi sangat beragam dan ruang lingkup diplomasi menjadi sangat luas tergantung apa kepentingan diplomasi yang hendak dicapai. Diplomasi selalu berkaitan dengan kegiatan hubungan luar negeri yang diwakili oleh aktor negara seperti diplomat maupun aktor non-negara seperti pebisnis atau mahasiswa.

Ruang lingkup kegiatan diplomasi terletak di luar batas yurisdiksi nasional yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan mencapai kepentingan, seperti keamanan nasional, kepentingan ekonomi, maupun sosial budaya. Diplomasi digunakan untuk menyelesaikan agenda-agenda tertentu di luar batas negara. Diplomasi berusaha untuk mengubah kebijakan, tujuan, tindakan atau bahkan sikap pemerintahan negara lain dan diplomatnya melalui cara yang persuasi, saling menawarkan penghargaan atau pemberian ancaman.³⁹ Menurut G.R. Berridge (2010), diplomasi merupakan sebuah aktivitas politik yang dilakukan oleh aktor diplomasi guna untuk mendapatkan atau mengejar tujuan nasionalnya dan mempertahankan kepentingan negaranya dengan menggunakan negosiasi, tanpa menggunakan propaganda, kekerasan, atau hukum.⁴⁰

Diplomasi dilakukan dalam berbagai macam cara untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Maka dari itu, berdasarkan berbagai

³⁹ Sukawarsini, Djelantik, 2008, *Diplomasi antara Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 4

⁴⁰ G.R Berridge, 2010, *Diplomacy: Theory and Practice, 2nd ed.* New York: Palgrave

definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa inti dari diplomasi adalah ketersediaan sebuah negara untuk memberi dan menerima untuk mendapatkan kesepakatan atau kesepakatan antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Dimana masing-masing negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, politik, maupun kepentingan untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri.

B. Konsep Tentang Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan kondisi yang menggambarkan terdapatnya hubungan yang saling mempengaruhi dan terjadinya hubungan timbal balik antara dua negara.⁴¹ Hubungan Bilateral terdiri dari hubungan ekonomi, politik atau budaya antara dua negara berdaulat/merdeka. Apabila negara sudah mengakui satu sama lain sebagai masing-masing negara berdaulat maka mereka juga sudah setuju untuk mengembangkan hubungan dipomatik negaranya dan mereka akan bertukar aktor diplomatik seperti duta besar untuk mewakili kerja sama dan dialog antar negara.

Hubungan bilateral merupakan bentuk hubungan kerja sama oleh satu negara dengan negara lain, dimana negara tersebut berada di lingkungan regional ataupun di benua lain. Konsep hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia sendiri mengacu kepada agenda pembangunan nasional dimana

⁴¹ Didi Krisna, 1993, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo. Hal 18

menyangkut dengan perwujudan masyarakat yang damai dan aman, demokratis dan adil, serta masyarakat yang sejahtera. Selain itu, hubungan bilateral di dalam konteks hubungan internasional biasanya terdiri dari dua konteks, yakni konflik dan kerja sama. Namun, kedua konteks ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Hubungan bilateral juga dapat diartikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari kedua negara untuk berinteraksi dan membuat kesepakatan di dalam bidang tertentu dengan tujuan dan cara yang telah disepakati bersama.

Menurut Kusumohamidjojo yang mengatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan nasional setiap negara, maka setiap negara tidak bisa menghindari dari adanya interdependensi atau saling ketergantungan antar kedua negara yang memaksakan setiap negara untuk melakukan hubungan kerja sama baik bilateral maupun multilateral, namun interdependensi ini juga bisa memunculkan kemungkinan untuk adanya kompetisi antar kedua negara.⁴² Dia juga menerangkan bahwa pengertian hubungan bilateral yaitu sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara baik yang memiliki kedekatan secara geografis maupun yang jauh atau menyebrangi samudera dan benua yang dilakukan dengan sasaran dan tujuan utama agar mewujudkan

⁴² Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional*, Jakarta : Bina Cipta. Hal 1

perdamaian dengan mempertimbangkan kesamaan politik, struktur ekonomi, dan kebudayaan.⁴³

Negara-negara yang melakukan hubungan bilateral, maka mereka sepakat untuk mengembangkan perjanjian atau kerja sama di berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan. Negara melakukan hubungan bilateral sebagai perwujudan dari pergaulan masyarakat Internasional yang ditujukan agar mampu mencapai kepentingan masing-masing negara yang disesuaikan dengan perkembangan situasi Internasional yang berlaku. Selain itu, hubungan bilateral menjadi unsur utama di dalam pelaksanaan hubungan internasional, yang mencakup hubungan antara negara asal dan negara tujuan yang didasarkan pada persetujuan dan norma hukum internasional.⁴⁴ Adanya hubungan saling ketergantungan antar negara terutama terkait masalah TKI yang banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia dan Arab Saudi harus dipertahankan dan dikembangkan melalui hubungan bilateral kedua negara yang lebih harmonis.

Hubungan bilateral dilakukan oleh dua negara untuk membicarakan berbagai topik untuk memajukan tujuan domestik dan internasionalnya sendiri. Selain itu, hubungan tersebut juga dilakukan untuk mengenali perbedaan dan mengambil tindakan segera untuk meminimalkan

⁴³ *Ibid*, Hal 13

⁴⁴ Khisan Rana, 2022, *Bilateral Diplomacy : Actors, tools, and Processes in 2022*, Diakses pada tanggal 4 Mei 2022 melalui <https://www.diplomacy.edu/topics/bilateral-diplomacy/>

kemungkinan masalah sangat penting dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kedua negara. Hubungan bilateral dilakukan karena sangat penting bagi negara mana pun untuk terlibat langsung dengan negara lain baik negara yang berada di lingkungan terdekat sampai yang paling luar, dimana hasil dari keterlibatan ini untuk memperkuat tujuan dari negara mereka sendiri.⁴⁵ Negara juga mampu membangun koalisi kepentingan di forum regional maupun multilateral dengan melakukan hubungan bilateral antar dua negara.

Dalam konteks Negara Indonesia, pemerintah mengupayakan agar bisa meningkatkan hubungan bilateral terhadap negara yang di nilai mampu memberikan kontribusi yang besar dan peluang untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia itu sendiri sudah terjalin sejak lama yakni tahun mulai 1950, yang diwarnai dengan jalinan kerja sama yang intensif, sehingga menjadikan hubungan antar kedua negara menjadi lebih erat.⁴⁶

Adanya hubungan bilateral sebuah negara dengan negara lain di bidang ketenagakerjaan mampu menjadi faktor pendorong adanya migrasi internasional yang dilator belakang atau dipengaruhi oleh adanya hubungan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Kurnia Majid, 2014, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011", UIN Syarif Hidayatullah, *Skripsi*

yang harmonis dari hubungan bilateral kedua negara. Jika hubungan bilateral kedua negara semakin harmonis, maka peluang kerja sama untuk pertukaran tenaga kerja atau pengiriman tenaga kerja dengan jumlah besar akan semakin mudah terwujud. Selanjutnya, melalui keeratan hubungan bilateral kedua negara maka akan saling melengkapi kekurangan kedua negara terutama di dalam pemenuhan kepentingan dan pembangunan nasional negaranya.⁴⁷

Indonesia sendiri telah melakukan berbagai hubungan bilateral antar suatu negara dibidang ketenagakerjaan salah satunya negara Arab Saudi. Masalah terkait tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi telah menjadi sebuah isu yang mewarnai jalinan hubungan bilateral kedua negara. Hubungan bilateral yang baik antara kedua negara diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan terkait tenaga kerja melalui berbagai upaya diplomasi dan kerja sama.

⁴⁷ Erman Suparno, 2009, *National Manpower Strategy*, Jakarta : PT Kompas Gramedia Nusantara. Hal 18